



Atasi Kekurangan Kelas, Digelontor Rp 5 M

SEMARAPURA- Jumlah peserta didik yang terus bertambah setiap tahun membuat sejumlah sekolah di Kabupaten Klungkung mengalami kekurangan kelas. Di sisi lain, seiring berjalannya waktu ada ruang kelas sejumlah sekolah mengalami kerusakan sehingga membutuhkan perbaikan segera. Terkait hal itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung akan melakukan penambahan ruang kelas di sejumlah sekolah. Begitu pun sarana belajar juga segera diperbarui dengan anggaran sekitar Rp 5 miliar.

Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Penerimaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, Nyoman Sukadana, Selasa (6/2) mengungkapkan, hingga saat ini ada empat SMP yang mengalami kekurangan ruang kelas dan satu SMP tidak memi-

liki perpustakaan. Adapun SMP yang mengalami kekurangan ruang kelas tersebut, yaitu SMP Negeri 1 Semarapura dengan kekurangan tiga ruang kelas, SMP Negeri 3 Semarapura dengan kekurangan sebanyak tiga ruang kelas, SMP Negeri 2 Dawan dengan kekurangan sebanyak enam ruang kelas, SMP Negeri 4 Nusa Penida mengalami kekurangan dua ruang kelas, serta SMP Negeri 6 Nusa Penida yang tidak memiliki perpustakaan. "Untuk SMP Negeri 4 Nusa Penida karena ruang kelasnya kurang dan rusak parah, maka kami batalkan melakukan rehap. Adapun kami akan membangun empat ruangan yang salah satunya kami peruntukan untuk ruang komputer," ujarnya.

Untuk Sekolah Dasar (SD), diungkapkannya, Dinas Pendidikan Klungkung terakhir kali telah membangun empat

ruang kelas di SD Negeri 1 Semarapura Tengah dan dua ruang kelas di SD Negeri 1 Semarapura Kangin. "Dan itu sudah selesai semua pembangunannya. Sehingga di tahun 2018 ini, kami sudah tidak membangun lagi ruang kelas. Jadi tinggal melakukan rehap-rehap saja," katanya.

Tidak hanya ruang kelas, menurutnya dari total sekitar 150 SD yang ada di Kabupaten Klungkung, ada sebanyak 90 SD yang sarana pembelajarannya mengalami kerusakan. Seperti alat peraga olahraga, matematika, IPA dan mata pelajaran lainnya. Pasalnya bantuan sarana pembelajaran itu terakhir kali diberikan sekitar tahun 2010 lalu sehingga memang banyak yang mengalami kerusakan. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung berencana memberikan

bantuan sarana pembelajaran di tahun 2018. "Mereka punya sarana pembelajaran tapi rusak-rusak, tidak bisa dipakai. Mereka punya tapi tidak maksimal sehingga kami akan perbaiki. Tahun 2018 kami anggarkan Rp 5 miliar untuk di bidang sarana. Untuk prasarannya itu banyak, kami tidak bisa menghitung," terang Sukadana.

Lebih lanjut, pihaknya mengungkapkan, untuk mengatasi permasalahan sarana dan prasarana SD dan SMP di Kabupaten Klungkung pihaknya optimis bisa terselesaikan di tahun 2019 namun jika anggarannya memadai. Menurutnya dalam mengatasi masalah sarana dan prasarana ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 40 miliar. "Sebagai pelaksana saya yakin bisa menyelesaikan itu dengan catatan uangnya ada," tandasnya. (ayu/dit)

Edisi : Jumat, 9 Februari 2018

Hal. : 2



Hibah Kok Dipakai Nyicil LPD

Ditemukan Banyak Penyelewengan Dana Bantuan Disbud Klungkung

SEMARAPURA- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Klungkung saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) menemukan banyak masalah. Monev untuk memastikan bantuan hibah penunjang urusan kebudayaan yang diterima 282 penerima dari APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 21 miliar itu ternyata banyak diselewengkan. Malah ada dana bantuan hibah digunakan membayar utang di LPD.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora)

Klungkung I Nyoman Mudarta, Kamis (8/2) mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan Monev di tiga kecamatan di Klungkung daratan, seperti Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, dan Dawan. Dan Jumat hari ini dilanjutkan ke Kecamatan Nusa Penida. "Intinya kami akan sasar semua pengguna hibah," ujarnya.

Selama menggelar Monev di tiga kecamatan, pihaknya mengaku menemukan berbagai penyimpangan yang dilakukan penerima hibah. Seperti pura yang dibangun sebelum dana hibah diterima. Padahal sesuai aturan, proyek itu baru bisa dijalankan setelah hibah cair. Kemudian ada dana hibah sebesar Rp 70 juta yang dalam permohonannya akan digunakan pengadaan gong, namun pada kenyataannya dipergunakan membayar pinjaman pembelian gong

di LPD. "Ada lagi satu pura memiliki dua nama di wilayah Banjarangkan. Yang satunya mendapat bantuan yang difasilitasi dewan sebesar Rp 30 juta, yang satunya dari permohonan warga itu sendiri Rp 20 juta. Sudah saya suruh untuk mengembalikan dan sudah dikembalikan Rp 20 juta itu," kata pejabat asal Desa Tegak, Kecamatan Klungkung itu.

Adanya satu pura yang mendapatkan dua hibah akibat diajukan oleh dua orang berbeda dan dengan nama berbeda, menurutnya bisa terjadi karena kegiatan verifikasi dilakukan orang berbeda pula. Untuk itu, ke depannya pihaknya akan melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan kebenaran proposal sebelum melakukan penandatanga-

nan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Nanti kami akan melakukan rapat untuk menindaklanjuti temuan-temuan ini. Sebenarnya tugas kami memverifikasi dan menggelar Monev. Dan ada masalah baru seperti ini, sebelum mencairkan hibah kami akan melakukan pengecekan dulu. Jadi ada tugas tambahan," terang Mudarta.

Lebih lanjut diungkapkannya, hingga saat ini ada sebanyak 28 penerima hibah yang belum menyetorkan Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ). "Dan ada dua penerima bantuan hibah yang mengembalikan bantuannya karena merasa tidak mampu menyelesaikan mengingat waktu yang mepet. Yaitu masing-masing Rp 250 juta dan Rp 400 juta," tandasnya. (ayu/dit)

Edisi : Jumat, 9 Februari 2018

Hal. : 2